

# Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

<sup>1</sup>\*Maman Suherman AR, <sup>2</sup>Indra Aditya Prayoga  
Universitas Nurtanio  
Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>mamanvilar@gmail.com, <sup>2</sup>indraadityaprayoga1@gmail.com

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 26/11/2023

Diterima : 06/12/2023

Dipublikasi : 01/01/2024

## ABSTRAK

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer dan sekunder menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimensi yang menjadi alat ukur implementasi yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berdasarkan ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber daya manusia cukup memadai, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas masih relatif kurang, komunikasi dengan transmisi/ penyaluran informasi sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten, struktur organisasi dapat bekerja dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, namun dalam sisi kerja sama masih harus ditingkatkan, pengaruh program terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik cukup positif, dukungan elit politik yang baik, respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Kampung Keluarga Berencana, Kualitatif

## I. PENDAHULUAN

Setelah lahirnya Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Keluarga Berencana, Kampung Keluarga Berencana berkembang dengan pesat dan merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan dan menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk pada periode ini, dan berkonsentrasi di desa atau kampung terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga (Nugroho, 2014). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mensosialisasikan program Sabilulungan Membangun Keluarga Sejahtera (Sabangsa) melalui Kampung Keluarga Berencana (KB). Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), Pemerintah Kabupaten Bandung, mencanangkan 62 Desa untuk dibangun Kampung KB Sabilulungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat sabilulungan dan kemandirian.

Keberadaan kampung KB bisa menjadi salah satu solusi yang tepat guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pasalnya keberadaan kampung KB di Kabupaten Bandung saat ini berjumlah 86 yang tersebar di 31 Kecamatan dengan jumlah posyandu di mencapai 4.288 buah, yang terdiri dari 738 madya, 1.601 purnama dan 1.949 mandiri. Jika dilihat dari jumlah posyandu tersebut, pembangunan KB di Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Selain itu Kabupaten Bandung tidak memiliki posyadu pratama. Dengan potensi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung tinggal mengeluarkan inovasi agar masyarakat dapat memahami apa saja fungsi keluarga, sehingga program Sabangsa dapat dipahami oleh semua masyarakat. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung dan komponen pembangunan daerah harus melakukan berbagai langkah penguatan program KKBPK yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, penguatan sinergitas dan komitmen para stake holder di seluruh tingkatan wilayah harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing, dimana pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bandung.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di wilayah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung diketahui bahwa Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana telah berjalan namun belum optimal, pelaksanaan program KKBPK di Kecamatan Katapang pada saat ini dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti perbedaan pandangan terhadap KB dan ketidakselarasan produk hukum terkait kependudukan dan KB serta laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yakni 1,63%, masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJT (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yaitu sekitar 24,94% dari total akseptor dan masih kurangnya pengetahuan remaja terkait isu tentang reproduksi yang sehat.

Fenomena tersebut merupakan suatu kondisi yang menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung”.

## II. STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Administrasi publik merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan publik, banyak para Ahli menyebutkan bahwa administrasi publik sama dengan administrasi negara yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif (Anggara, 2012) serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara (Sudriamunawar, 2012).

Menurut Dimock & Dimock dalam (Silalahi, 2017) administrasi publik adalah “merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan dan kemudian dikendalikan”. Selanjutnya, Waldo dalam (Anggara, 2012) mendefinisikan “administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Implementasi kebijakan ini merupakan fungsi dan tugas administrator publik dalam mengaplikasikan lebih lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan (*policy makers*) tersebut, yang suka tidak suka bagi para administrator harus menjalankannya. Peran administrator publik akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan oleh para *policy maker* (Suharno, 2010) serta merupakan jembatan penghubung antara yang diamanatkan negara bagi kepentingan masyarakat untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh para administrator publik tentunya melalui pendekatan yang kondusif dan intensif (Faisal, 2010).

Secara konseptual, kebijakan publik (*public policy*) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki *Locus* dan *Focus* yang berbeda. *Locus* ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan *focus* ilmu administrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. (Madani, 2011).

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2012) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah

Pendapat lain dari Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino, 2022) Implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Wahab, 2017).

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014) menawarkan suatu model dasar dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan
2. Sumber-sumber Kebijakan
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan
4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun, dibalik kerumitan dan kekompleksitasannya tersebut, implementasi memegang peranan yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja pembuat para kebijakan.

Sedangkan pengertian dari Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti:

1. Wilayah kumuh
2. Kampung pesisir atau nelayan
3. Berada di Daerah Aliran Sungai (DAS)

4. Daerah bantaran Kereta Api
5. Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan)
6. Terpencil
7. Wilayah Perbatasan
8. Kawasan Industri
9. Kawasan Wisata
10. Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain:

1. Pendidikan rendah
2. Infrastruktur kurang memadai

Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan. (Direktorat Advokasi dan KIE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo).

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Kurniawan, 2014), pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi (Umar, 2013).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive (Moleong, 2009), sehingga ditentukan diantaranya 1) Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 2) Kasi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia DP2KBP3A Kabupaten Bandung, 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Katapang, 4) Sekretaris Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, 5) Pengurus Kampung KB di Kampung Cijagra RW 13 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, 6) Tokoh Masyarakat Kampung Cijagra RW 13, 7) Tokoh Masyarakat Kampung Cijagra RW 13, dan 8) Tokoh pemuda di Kampung KB Mandiri Desa Pangauban Kecamatan Katapang.

Proses analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles and Huberman dalam (Creswell, 2022) meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi sumber (Sugiyono, 2021). hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam penelitian, dan juga melihat keadaan lapangan sehingga ditakutkan dapat mengganggu kinerja maupun kenyamanan dari para pegawai.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) yang dianalisis berdasarkan: 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4) Karakteristik badan-badan pelaksana, 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, 6) Kecenderungan pelaksana (Implementors). Adapun hasilnya dapat dibahas sebagai berikut:

#### a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Tercapainya tujuan program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung mengacu pada ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB, tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB, dan manfaat yang dirasakan dengan adanya program Kampung KB.

Ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dapat diukur melalui hasil peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga (fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan) dengan baik yang berorientasi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan terbebasnya masyarakat dari

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga terbentuk keluarga kecil yang berkualitas.

Tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan meskipun belum keseluruhan program sesuai dengan harapan, keseluruhan tujuan program belum tercapai dengan baik karena dipengaruhi beberapa kendala yang dihadapi seperti tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal dan keterbatasan anggaran yang fasilitas penunjang.

Mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, cukup terasa. Hal itu ditunjukkan dengan adanya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga dan perbaikan lingkungan, peningkatan kegairahan menjalankan kegiatan ekonomi, meningkatnya wawasan dan kecerdasan masyarakat dalam menggapai kesuksesan di masa depan.

#### b. Sumber-sumber kebijakan

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial, serta sumber daya fasilitas yang memadai menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, tanpa mengabaikan sumber-sumber daya lainnya yang mempunyai peranan penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas cukup berbeda dan beragam karena dipengaruhi status implementor dari sisi kepegawaian pemerintah dan dari unsur sukarela (masyarakat). Secara jumlah (kuantitatif) masih relatif kurang, terutama dari unsur masyarakat. Namun secara kualitas rata-rata keseluruhan cukup baik meskipun, tingkat kesadaran, motivasi kerja, dan tingkat pemahaman regulasi yang berbeda-beda.

Menganai mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung yang sudah berjalan selama ini dilakukan dengan dua cara yaitu top down dan bottom up. Top down berupa anggaran yang sudah disiapkan setiap tahunnya melalui program kegiatan yang disusun dari atas (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten), dan bottom up adalah anggaran yang diajukan dari bawah yang dimulai dari penyusunan jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan anggarannya dari pengurus Kampung KB yang kemudian diajukan dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kemudian diajukan ke Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ke tingkat pusat.

Sumber anggaran program Kampung KB berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Kabupaten, dan juga dari ADD. Dari sisi kecukupan anggran pada lokasi Kampung KB yang berada di Kecamatan Katapang, anggaran tersebut KB belum cukup memadai untuk dapat melaksanakan keseluruhan agenda kegiatan yang sudah disusun dan ditetapkan, sehingga dibuat langkah kebijakan dengan cara skala prioritas.

Dalam hal ketersediaan dan kecukupan fasilitas/ sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, masih belum memadai dan cenderung banya kekurangan. Buktinya tampak pada sebagian besar Kampung KB dengan belum tersedianya fasilitas rumah literasi, fasilitas untuk konseling remaja juga Kampung KB di beberapa desa belum ada. Kondisi real yang terlihat rata-rata fasilitas/sarana prasarana yang tersedia di tiap-tiap Kampung KB hanya sebatas timbangan bayi dan timbangan lansia, serta meteran pengukur tinggi tubuh.

#### c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

Terjalinnnya komunikasi dengan transmisi/ penyaluran yang baik, jelas dan konsisten merupakan ukuran keberhasilan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, menggunakan alat ukur penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB, kejelasan informasi pada sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB, dan tingkat konsistensi sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan

program Kampung KB.

Penyaluran informasi/sosialisasi mengenai kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai cara, bukan hanya melalui pertemuan-pertemuan/penyuluhan langsung tetapi juga dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana platform digital, namun pada tingkat terendah di lapisan masyarakat, masih dikeluhkan terjadinya ketidak merataan informasi (terutama penyuluhan) yang hanya melibatkan penggiat-penggiat lama di masyarakat dan kurang melibatkan unsur masyarakat lainnya secara luas.

Sedangkan masalah kejelasan informasi dari materi sosialisasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dapat ditangkap sebagian masyarakat dengan cukup jelas, bahkan terdapat masyarakat yang secara pro aktif menggali dan mempelajari informasi melalui platform digital, seperti media online, website BKKBN dan media sosial. Sayangnya terdapat faktor penghambatnya dalam hal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih kurang, dan adanya sikap kurang merangkul semua kalangan masyarakat dari para pengurus Kampung KB dan para kader yang terlibat.

Beruntung dari sisi tingkat konsistensi sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, secara umum sudah cukup konsisten, baik yang dilakukan dengan pertemuan langsung maupun yang dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan media online. Meskipun begitu, belum cukup menjangkau secara keseluruhan semua kalangan masyarakat yang seharusnya menerima materi sosialisasi tersebut.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Tersediannya struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi yang baik menjadi syarat yang tak kalah penting dari dimensi-dimensi lainnya dalam implementasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Untuk itu digunakan alat ukur tentang : kinerja struktur organisasi pengurus dalam melaksanakan program Kampung KB, SOP untuk melaksanakan program Kampung KB, dan Kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program Kampung KB.

Kinerja struktur organisasi pengurus dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung secara umum relatif sudah cukup baik, karena mereka menunjukkan semangat tinggi dan selalu berusaha melaksanakan berbagai agenda kegiatan sesuai panduan teknis, hanya saja masih kurang memanfaatkan partisipasi masyarakat terutama kalangan muda yang memiliki pendidikan tinggi dan diyakini akan lebih berkontribusi kepada pelaksanaan program Kampung KB.

Dari sisi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan teknis dalam melaksanakan kebijakan program Kampung KB, SOP yang dimaksud sudah tersedia cukup lengkap, detail, dan jelas (baik soft file maupun hard file/cetakan), sehingga memudahkan para agen pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. SOP tersebut akan terlihat hasilnya secara optimal bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua jajaran implementor kebijakan.

Hasil pengukuran masalah kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, sudah terjalin cukup baik. Namun kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas dengan instansi lain (lintas sektor) dan juga pihak-pihak ketiga yang sebenarnya mempunyai program yang berhubungan dengan kepedulian sosial (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Kampung KB, seperti perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan, atau bahkan menggali potensi program CSR dari perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan BUMD, serta yang lainnya.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Terciptanya pengaruh yang baik dari implementasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik, serta adanya dukungan elit politik diukur dengan: kontribusi program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian, pengaruh program Kampung KB terhadap kondisi sosial dan situasi politik, dan tingkat dukungan elit politik terhadap program Kampung KB.

Kontribusi program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Katapang Kabupaten, cukup nyata bagi masyarakat dalam mendorong perkembangan ekonomi. Terbukti kegiatan-kegiatan usaha kecil/keluarga bermunculan dengan berbagai produk hasil keterampilan tangan, industri pakaian jadi, kuliner dan bidang usaha lainnya, yang juga sudah bisa memanfaatkan majunya perkembangan teknologi informasi berupa kehadiran marketplace dan media sosial.

Pengaruh program Kampung KB terhadap kondisi sosial dan situasi politik di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, menunjukkan adanya dampak yang positif dalam peningkatan kondisi sosial dan situasi politik yang semakin kondusif. Kondisi sosial dianggap semakin membaik karena berhasil menekan angka pengangguran, kriminalitas dan rusaknya moralitas masyarakat, dan semakin terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat. Sedangkan pada situasi politik, terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, Pileg, dan Pilkada, semakin kecilnya perselisihan akibat perbedaan kepentingan politik, dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat kepada pemerintah dan para elit politik.

Demikian juga dengan tingkat dukungan elit politik terhadap program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, cukup baik, tanpa memperlihatkan warna dan haluan politik ataupun posisi pihak yang berkuasa ataupun oposisi, semua elit politik mendukung program ini. Bentuk dukungan mulai dari tingkat perumusan kebijakan, pembentukan tim pelaksana program, implementasinya dengan dukungan sosialisasi dan sokongan anggaran seperti halnya peyaluran dana aspirasi DPRD Kabupaten Bandung.

f. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Tingkat respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana dalam implementasi kebijakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung menggunakan indikator-indikator respon implementor terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan program Kampung KB, pemahaman implementor terhadap kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB, dan Sikap implementor dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut program Keluarga KB.

Respon implementor terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, cukup baik. Para agen pelaksana tersebut sering bergerak cepat menangani masalah di kalangan masyarakat melalui cara persuasif, yaitu pendekatan dan pembinaan bertahap yang dapat diterima dan dipahami masyarakat Kecamatan Katapang.

Dari sisi pemahaman terhadap regulasi kebijakan program Kampung KB, para implementor baik dari unsur pemerintahan maupun yang terlibat dari unsur masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman tersebut mencakup bukan hanya terhadap regulasi, tetapi juga pemahaman kepada juknis, strategi program, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan program Kampung KB.

Sikap implementor dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut program Kampung KB, cukup baik dan bijak, dengan selalu mengedepankan unsur dialog, tukar pikiran dari hati ke hati dengan masyarakat sambil memberikan pemahaman tentang manfaat program kepada masyarakat yang dilakukannya dengan cara bersilaturahmi secara kekeluargaan bilamana terdapat masyarakat yang tidak bersedia mengikuti program Kampung KB.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan program Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dilihat dari tercapainya tujuan program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Ukuran ideal pencapaian standar dan sasaran program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung diukur melalui hasil peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga dengan baik. Tingkat pencapaian tujuan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung secara umum sudah cukup berhasil walaupun belum keseluruhan tujuan program tercapai dengan baik karena dipengaruhi beberapa kendala yang dihadapi seperti tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal dan keterbatasan anggaran yang fasilitas penunjang. Manfaat yang dirasakan dengan adanya program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terlihat dengan adanya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga dan perbaikan lingkungan, peningkatan kegairahan menjalankan kegiatan ekonomi, meningkatnya wawasan dan kecerdasan masyarakat dalam menggapai kesuksesan di masa depan.
2. Sumber-sumber kebijakan dilihat dari tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial, serta sumber daya fasilitas yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dari segi kuantitas dan kualitas dari sisi kualitas dan kuantitas cukup berbeda dan masih beragam, mengingat secara jumlah masih relatif kurang walaupun secara kualitas rata-rata keseluruhan cukup baik. Mekanisme penganggaran dan kecukupan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, melalui Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, kabupaten dan desa/kelurahan dengan memperhatikan kebutuhan krusial pelaksanaan program. Ketersediaan dan kecukupan fasilitas/ sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung belum lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok kegiatan yang ada. Masing-masing kelompok kegiatan (poktan) belum mempunyai sarana prasana masing-masing. Peralatan yang tersedia di tiap-tiap Kampung KB kebanyakan hanya sebatas timbangan bayi dan timbangan lansia, serta meteran pengukur tinggi tubuh.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan dilihat dari terjalannya komunikasi dengan transmisi/ penyaluran yang baik, jelas dan konsisten. Penyaluran informasi/sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dilakukan secara online dengan Grup Whatsapp Pokja, Kader, dan Pengurus Kampung KB, pemanfaatan kampanye program melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya), serta penyediaan informasi lengkap melalui website Kampung KB dan website BKKBN. Kejelasan informasi pada sosialisasi kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung masih kurang sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak tertarik untuk mengikuti program Kampung KB.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana dilihat dari tersediannya struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi yang baik. Kinerja struktur organisasi pengurus dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung relatif sudah cukup baik terlihat dari sisi semangat kerja, kompetensi, kapabilitas, dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan, walaupun dengan segala keterbatasan anggaran dan peralatan pendukung. SOP untuk melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tersedia cukup lengkap, detail, dan jelas berupa Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Program Kampung KB yang dicetak secara nasional oleh BKKBN disamping petunjuk-petunjuk khusus dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung. Kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Kampung KB dengan unsur Pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sudah terjalin tidak hanya dalam lingkup yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Kampung KB saja, tetapi sudah terjalin juga antara pengurus Kampung KB dengan instansi lain yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan Dinas Dinas KUKM Kabupaten Bandung.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dilihat dari terciptanya pengaruh yang baik terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik, serta adanya dukungan elit politik. Kontribusi program Kampung Keluarga Berencana terhadap perkembangan perekonomian di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung cukup nyata bagi masyarakat dalam mendorong perkembangan ekonomi, dan menjadi bukti bahwa Kampung KB bukan hanya program tentang pembatasan kelahiran saja, tetapi juga berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh program Kampung KB terhadap kondisi sosial dan situasi politik di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung menunjukkan adanya pengaruh yang baik dalam peningkatan kondisi sosial dan situasi politik yang semakin kondusif. Tingkat dukungan elit politik terhadap program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung cukup baik tanpa mempersoalkan partai dan haluan politik yang berbeda ataupun perbedaan posisi pihak yang berkuasa atau oposisi.
6. Kecenderungan pelaksana (*implementors*) dilihat dari adanya respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana. Respon implementor terhadap setiap masalah yang terjadi dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sering bergerak cepat menangani masalah di kalangan masyarakat melalui cara persuasif, yaitu pendekatan personal penuh kekeluargaan, dan pembinaan bertahap yang dapat diterima dan dipahami masyarakat Kecamatan Katapang. Pemahaman implementor terhadap kebijakan dalam melaksanakan program Kampung KB di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung mulai Pokja tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat Desa, sampai ke Kader dan Pengurus Kampung KB, sudah cukup baik. Sikap implementor dan pengurus Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Katapang dalam menangani masyarakat yang tidak mau ikut program Keluarga KB cukup baik dan bijak dengan selalu mengedepankan unsur dialog, tukar pikiran dari hati ke hati sambil memberikan pemahaman tentang manfaat program.

#### SARAN

1. Peningkatan sosialisasi melalui sarana media yang lebih canggih. Dapat diakses melalui *website* yang aktif dan informasi kegiatan up to date
2. Perlu adanya pendekatan ke warga secara rutin yang dilakukan oleh para kader ataupun aparatur Pemerintah dari Kabupaten
3. Peningkatan kerja dari SOP. Jika perlu diadakan pelatihan secara rutin minimal 2 kali dalam satu tahun berjalan.

#### VI. REFERENSI

- Agustino, L. (2022). *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- BKKBN. (2015). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cetakan ke-5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*.

---

London: Sage Publications.

- Faisal, S. (2010). *Format Format Penelitian Sosial: Dasar Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode, Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Di Lengkapi Perhitungan Pengolahan Data Dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Silalahi, U. (2017). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.